



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/1225 TAHUN 2025

TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dilakukan perubahan berupa:
- a. penambahan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang; dan/atau
 - b. penghapusan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang.
- KETIGA : Penambahan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, diajukan oleh Perangkat Daerah pengusul melalui permohonan izin/persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pengusul kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Penghapusan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, dapat dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah pengusul, dengan mengajukan permohonan penghapusan dari Kepala Perangkat Daerah pengusul kepada Wali Kota Kota Semarang; atau
 - b. Wali Kota Semarang, dalam rangka pembinaan perencanaan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang dalam hal penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tersebut tidak mengalami perkembangan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah Pengusul dapat mengusulkan rancangan Peraturan Wali Kota di luar Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang dengan alasan:
- a. Peraturan atas tindak lanjut terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan putusan dari lembaga peradilan;

- c. Tindak lanjut temuan/rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus segera diselesaikan sesuai tenggat waktu rekomendasi;
- d. Amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbit setelah ditetapkan Keputusan ini;
- e. Tindak lanjut arahan Wali Kota Semarang; atau
- f. Tindak lanjut penanganan kejadian luar biasa atau bencana yang harus segera diselesaikan.

KEENAM : Perangkat Daerah Pengusul penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, wajib menyampaikan waktu penyusunan Peraturan Wali Kota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang paling lambat akhir semester I tahun 2026.

KETUJUH : Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Perangkat Daerah pengusul belum menyampaikan waktu pengajuan usulan Peraturan Wali Kota Semarang, maka akan dilakukan evaluasi terhadap usulan Peraturan Wali Kota Semarang tersebut.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Perangkat Daerah Pengusul yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/1225 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
WALI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	1. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
		2. Pengawasan Pajak Daerah secara Elektronik
		3. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
		4. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.
		5. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
		6. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
		7. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir
		8. Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi Daerah
		9. Nilai Jual Kena Pajak dan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
		2. Perubahan Keempat atas Perwal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
		3. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
		4. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
		5. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
		6. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
		7. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
		8. Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		9. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang tata cara pergeseran APBD.
		10. Analisis Standar Belanja Non Fisik.
		11. Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		12. Bagan Akun Standar
		13. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027
		14. Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
		15. Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
		2. Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
		4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
		5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
		6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
		7. Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender di Kota Semarang
		8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak di Kota Semarang
		9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC di Kota Semarang Tahun 2026-2030

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
		10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang
4.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	1. Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
		2. Kerja Fleksibel
		3. Aparatur Sipil Negara Corporate University
		4. Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan
5.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang
		2. Penyelenggaraan Riset
6.	Inspektorat	1. Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
		2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7.	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	1. Penatausahaan Penguasaan Bidang Tanah untuk Pendaftaran Tanah.
		2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
		3. Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		4. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang
8.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penanggulan Tuberkulosis.
		2. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kota Semarang.
		3. Perubahan Perwal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang.
		4. Peninjauan Tarif Retribusi Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
		5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Semarang.
		6. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Mijen.
		7. Tarif Pelayanan Rumah Sakit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mijen.
		8. Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Selain Aparatur Sipil

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
		Negara Pada Rumah Sakit Daerah Mijen Kota Semarang.
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	1. Pengelolaan Rumah Susun Kota Semarang.
		2. Pengelolaan Retribusi Rumah Susun Kota Semarang.
		3. Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
		4. Pedoman Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
10.	Dinas Pendidikan Kota Semarang	1. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2026-2027
		2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
		3. Bantuan Pendidikan di Kota Semarang
		4. Muatan Lokal Sertifikasi Pelajar SD dan SMP
		5. Pembelajaran Muatan Lokal.
		6. Implementasi Transisi PAUD SD dalam Kesiapan Awal Bersekolah.
		7. Unit Layanan Disabilitas
		8. Peraturan Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pendidikan
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	1. Pemberian bantuan operasional PKK RT PKK RW
		2. Pemberian bantuan operasional RT RW
		3. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan
12.	Dinas Perhubungan Kota Semarang	1. Tata Cara Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak ketiga Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
		2. Zonasi Parkir Tepi Jalan Umum
		3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kemudahan Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro
14.	Dinas Perdagangan	1. Penyelenggaraan PKL
		2. Pengelolaan Pasar Tradisional
		3. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota	1. Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
	Semarang	2. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
		3. Satu Data Pemerintahan Daerah
		4. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah
17.	Dinas Sosial Kota Semarang.	1. Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin.
		2. Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok.
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.	1. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Tahun 2025-2029
		2. Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
		3. Sistem dan prosedur Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.
		4. Pengelolaan Investasi BLUD RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
		5. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD
		6. Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSD KRMT Wongsonegoro
		7. Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
		8. Rancangan Pedoman Standar Pelayanan RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
		9. Satuan Pengawas Internal
		10. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
		11. Tarif Pelayanan Kesehatan RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
19.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standarisasi harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
		Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026
		2. Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2027
		3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standarisasi harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026
		4. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2027.
20.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang	1. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
		2. Pelaksanaan Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan
21.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	1. Penegasan Batas Kelurahan Kota Semarang.
		2. Evaluasi Kinerja Kecamatan dan kelurahan Serta Camat dan Lurah.
		3. Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.
22.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang	1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian
		3. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
		5. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
		6. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
		7. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
		8. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
		9. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
		10. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.
		11. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
		12. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
		13. Pakaian Dinas ASN.
		14. Proses Bisnis Kota Semarang
		15. Kelas Jabatan ASN Kota Semarang.
		16. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
23.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Pemberian Layanan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum.
24.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	1. Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal.
		2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001